



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 5 NOMOR 1 (MEI 2024)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS ACEH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

Aulia Tassya^{a*}, Fanny Nailufar^b

^aUniversitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

^bUniversitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

[*fannynailufar@unimal.ac.id](mailto:fannynailufar@unimal.ac.id)

Diterima: Maret 2024 Disetujui: April 2024 Dipublikasikan: Mei 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the Aceh Special Autonomy Fund and Special Allocation Fund on poverty in Aceh Province. The data used in this study is time series data for 2013-2022, which was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (Kemenkeu). The data was then analyzed using multiple linear regression analysis methods. The results of this study show that the Aceh Special Autonomy Fund significantly affects poverty in Aceh Province. In contrast, the Special Allocation Funds do not significantly affect poverty in Aceh Province. At the same time, the Aceh Special Autonomy Fund and the Special Allocation Fund significantly affect poverty in Aceh Province.

Keywords: *Aceh Special Autonomy Fund, Special Allocation Fund, and Poverty.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dana otonomi khusus Aceh dan dana alokasi khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* tahun 2013-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana otonomi khusus Aceh berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara bersama-sama, dana otonomi khusus Aceh dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Dana Otonomi Khusus Aceh, Dana Alokasi Khusus, dan Kemiskinan.

I. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia dan merupakan daerah dengan kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera (Muliadi & Amri, 2019). Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh merupakan tantangan bagi pemerintah Provinsi Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh. Di mana setiap tahunnya anggaran pemerintah daerah menyusun program kegiatan pembangunan yang berorientasi pada penurunan tingkat kemiskinan (Sakinah, 2022).

Faktor kemiskinan di Provinsi Aceh umumnya disebabkan oleh, tingginya beban pengeluaran penduduk miskin, rendahnya pendapatan penduduk miskin, rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin, tingginya biaya transaksi ekonomi, dan meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok strategis. Penyebab kemiskinan dari masing-masing wilayah akan sangat berbeda, oleh karena itu adanya perbedaan penyebab kemiskinannya maka berbeda pula penyelesaiannya antara satu daerah dengan daerah lainnya (Bappeda Aceh, 2021). Angka kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera, pada September 2022 persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh tertinggi di urutan pertama dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera yaitu 14,75%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera tahun 2022 dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 1. Urutan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Pulau Sumatera

No.	Provinsi	Tingkat (%)
1	Aceh	14,75
2	Bengkulu	14,34
3	Sumatera Selatan	11,95
4	Lampung	11,44
5	Sumatera Utara	8,33
6	Jambi	7,70
7	Riau	6,84
8	Sumatera Barat	6,04
9	Kepulauan Riau	6,03
10	Bangka Belitung	4,61

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2022

Aceh merupakan Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera per September 2022. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS),

persentase penduduk miskin di Provinsi ini sebesar 14,75%. Bengkulu menduduki peringkat kedua dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sumatera, persentase penduduk miskin di Provinsi tersebut sebesar 14,34%. Persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan tercatat sebesar 11,95%, berikutnya persentase penduduk miskin di Lampung sebesar 11,44%. Sumatera Utara dan Jambi tercatat memiliki persentase penduduk miskin masing-masing sebesar 8,33% dan 7,70%. Persentase penduduk miskin di Riau sebesar 6,84%, diikuti oleh Sumatera Barat 6,04% dan Kepulauan Riau 6,03%, sementara itu persentase penduduk miskin terendah di Sumatera berada di Kepulauan Bangka Belitung. Persentase penduduk miskin di wilayah ini sebesar 4,61%.

Dibutuhkan peran yang besar dari pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengenai prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah pasal 279 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan atau ditugaskan kepada Daerah” (Yani, 2002). Otonomi daerah atau yang disebut dengan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pelayanan publik yang tepat dan layak untuk membantu masyarakat miskin di wilayah/kota Provinsi Aceh (Sakinah, 2022).

Desentralisasi fiskal menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada era reformasi. Kebijakan ini bertujuan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Diharapkan dana transfer yang diterima pemerintah daerah dapat digunakan secara optimal, sehingga penganggaran program daerah mencapai target dan sasaran

dengan mengikuti perencanaan pembangunan daerah masing-masing (Gumelar, 2021).

Salah satu faktor penurunan tingkat kemiskinan di daerah adalah pengelolaan Dana Perimbangan terhadap pemenuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, komponen Dana Perimbangan menjadi anggaran yang sangat penting karena jumlahnya sangat besar dan setiap tahunnya mengalami peningkatan serta menjadi pendorong utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah. Apabila anggaran tersebut digunakan secara optimal, maka masalah kemiskinan dapat tertanggulangi dengan cepat (Anwar dkk, 2016).

Seiring dengan pembangunan Aceh pasca konflik dan tsunami, maka pemerintah daerah berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui berbagai program kerja baik dalam bentuk program daerah maupun pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, yang tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun hingga saat ini angka kemiskinan di Provinsi Aceh tetap tinggi. Adanya perbedaan persentase penduduk miskin pada masing-masing kabupaten kota di Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan pembangunan juga berbeda. Apalagi persoalan kemiskinan tidak hanya menjadi masalah dalam perekonomian, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat (Basyir, dkk 2015).

Dengan menyerahkan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerahnya. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan masih mengalami kendala di daerah sehingga perlu di evaluasi agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal mampu mengurangi kemiskinan di daerahnya (Sakinah, 2022).

Sebagai daerah yang mendapatkan otonomi khusus, pemerintah Provinsi Aceh membuat upaya untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh, dengan

memanfaatkan pengalokasian Dana Otonomi Khusus (DOK) untuk membiayai kegiatan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Dana Otonomi Khusus (DOK) merupakan penerimaan pemerintah Provinsi Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan (UU Dana Otonomi Khusus NO. 11 Tahun 2006). Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (DOK) tidak hanya berada di tingkat provinsi, akan tetapi juga menjadi kewenangan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan perimbangan 60% dikelola pemerintah provinsi dan 40% dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Pengalokasian DOK dalam kegiatan pembangunan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan (Muliadi & Amri, 2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yang dilaksanakan ditingkat daerah. Kegiatan khusus ini sulit untuk diperkirakan dengan rumus alokasi khusus. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah, oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. Dana Alokasi Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Pembiayaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari & Adi 2008, dalam Rasu dkk, 2019). Dana Alokasi Khusus sangat penting bagi perkembangan suatu daerah,

namun masih banyak daerah yang setiap tahunnya tidak memanfaatkan Dana Alokasi Khusus yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat (Karyadi, 2017).

Berikut perkembangan Angka Kemiskinan, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Perkembangan Dana Otonomi Khusus Aceh, Dana Alokasi Khusus, dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2013-2022

Tahun	Dana Otonomi Khusus Aceh (Triliun Rupiah)	Dana Alokasi Khusus (Triliun Rupiah)	Tingkat Kemiskinan (Persen)
2013	6.220	1.254	17,72
2014	6.820	1.288	16,98
2015	7.060	3.107	17,11
2016	7.707	5.216	16,43
2017	7.971	3.998	15,92
2018	8.029	4.208	15,68
2019	8.344	4.018	15,01
2020	7.555	3.955	15,43
2021	7.555	4.106	15,53
2022	7.500	1.044	14,75

Sumber: BPS dan Kemenkeu, 2022

Dilihat dari tabel di atas untuk anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh dalam kurun waktu 2013-2022 cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2013 penerimaan DOKA sebesar Rp6.220 Triliun, meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp6.820 Triliun, meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp7.060 Triliun. Tahun 2016 terus meningkat sebesar Rp7.707 Triliun, meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp7.971 Triliun dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 sebesar Rp8.029 Triliun dan Rp8.344 Triliun. Pada tahun 2020-2021 DOKA mengalami penurunan sebesar Rp7.555 Triliun, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penghematan anggaran. Pada tahun 2022 DOKA mengalami penurunan anggaran sebesar Rp7.500 Triliun. Berdasarkan tabel tersebut penerimaan anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh paling tinggi pada tahun 2019 sebesar Rp.8.344 Triliun dan penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh paling rendah berada di tahun 2013 yaitu sebesar Rp.6.220 Triliun.

Dari tabel di atas memperlihatkan besarnya Dana Alokasi Khusus yang diterima Provinsi

Aceh mengalami fluktuatif selama periode 10 tahun, yaitu dimulai dari tahun 2013 DAK yang diterima sebesar Rp1.254 Triliun, pada tahun 2014 sebesar Rp1.288 Triliun. Tahun 2015 semakin meningkat sebesar Rp.3.107 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp5.216 Triliun, ditahun 2017 DAK yang diterima mengalami penurunan sebesar Rp3.998 Triliun, kemudian pada tahun 2018-2019 DAK meningkat sebesar Rp4.208 Triliun dan Rp4.018 Triliun, pada tahun 2020 DAK menurun kembali sebesar Rp3.955 Triliun disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya penghematan anggaran. Tahun 2021 anggaran DAK meningkat sebesar Rp4.106 Triliun, ditahun 2022 DAK mengalami penurunan sebesar Rp1.044 Triliun. Berdasarkan tabel tersebut realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Aceh paling tinggi berada di tahun 2016 sebesar Rp5.216 Triliun dan paling rendah pada tahun 2022 sebesar Rp1.044 Triliun.

Dilihat dari tabel di atas untuk angka kemiskinan di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2013-2022 mengalami fluktuatif. Tahun 2013 kemiskinan meningkat pada angka 17,72%, mengalami penurunan pada tahun 2014 pada angka 16,98%, mengalami kenaikan pada tahun 2015 pada angka 17,11%. Tahun 2016 mengalami penurunan pada angka 16,43%, pada tahun 2017 kemiskinan pada angka 15,92%, pada tahun 2018-2019 kemiskinan terus mengalami penurunan 15,68% dan 15,01%. Tahun 2020-2021 kemiskinan mengalami peningkatan diangka 15,43% dan 15,53% diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Aceh, pada tahun 2022 kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami penurunan pada angka 14,75%, akan tetapi Provinsi Aceh masih menduduki peringkat pertama dengan tingkat kemiskinan Provinsi tertinggi di Pulau Sumatera. Berdasarkan Tabel 2, angka kemiskinan di Provinsi Aceh tertinggi pada tahun 2013 yaitu 17,72% dan angka kemiskinan terendah di Provinsi Aceh di tahun 2022 yaitu 14,75%.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana

otonomi khusus aceh dan dana alokasi khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh (2013-2022).

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

Objek penelitian ini adalah dana otonomi khusus Aceh, dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen, sedangkan Kemiskinan sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu di Provinsi Aceh. Peneliti memilih lokasi ini karena Aceh merupakan Provinsi termiskin di Pulau Sumatera.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu 10 tahun yaitu tahun 2013-2022. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan pada penelitian maka peneliti mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Adapun data yang digunakan yaitu dana otonomi khusus Aceh, dana alokasi khusus dan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2013- 2022.

Pengumpulan data ini memakai teknik pengkajian kepustakaan dan mengambil data penelitian melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan data melalui bahan pustaka mencakup artikel ilmiah, jurnal, artikel, dan laporan pengkajian ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji.

Agar tidak menimbulkan pengertian ganda mengenai variabel utama pada penelitian ini, maka peneliti menjelaskan definisi masing-masing variabel. Variabel kemiskinan (Y) dalam penelitian ini untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Dana otonomi khusus Aceh (X_1), variabel dana otonomi khusus aceh (DOKA) dalam penelitian ini diukur melalui data dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang bersumber dari APBN dan dinyatakan dalam satuan triliun rupiah. Dana alokasi khusus (X_2), variabel dana alokasi khusus (DAK) dalam penelitian ini diukur melalui data dana alokasi khusus Provinsi Aceh yang bersumber dari APBN dan dinyatakan dalam satuan triliun rupiah.

B. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang merupakan alat analisis statistik yang dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Model data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu 10 tahun yaitu tahun 2013-2022. Adapun pengolahan data dengan *software* Eviews 10. Model regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$KEM = \alpha + \beta_1 DOKA + \beta_2 DAK + \epsilon$$

KEM : Kemiskinan

A : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Dana Otonomi Khusus Aceh

β_2 : Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus

DOKA : Dana Otonomi Khusus Aceh

DAK : Dana Alokasi Khusus

ϵ : *error term*

Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Sebelum melakukan analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linear yang baik.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal atau tidak dengan analisis grafik dan uji statistik. Pada pengkajian ini, uji statistik yang digunakan untuk menilai normalitas pada penelitian ini adalah uji Jarque Bera (JB) dengan *histogram-normality test*. Pada tingkat signifikansi 5%, indikator yang digunakan untuk pengambilan keputusan data tersebut terdistribusi normal atau sebaliknya sebagai berikut. Jika nilai probabilitas lebih besar (>) dari 0,05 maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil

(<) dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Namun sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari 10 berarti tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Beberapa cara untuk mengatasi masalah autokorelasi adalah sebagai berikut: 1. Mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (*generalized difference equation*). 2. Memasukkan variabel lag dari variabel terikat menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1, 3. Mengeluarkan satu variabel atau lebih variabel bebas yang mempunyai nilai korelasi sederhana relatif tinggi. 4. Transformasi variabel, menganalisis ulang model regresi yang sama, tetapi dengan nilai variabel-variabel yang telah ditransformasikan. 5. Penambahan data baru, semakin sedikit sampel yang diambil dalam penelitian akan cenderung meningkatnya adanya gangguan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi dan absolut adalah nilai mutlak. Apabila variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut dinamakan homoskedastisitas. Namun, apabila variasi residualnya berbeda, maka dinamakan heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi

>0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikansi <0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% (0,05). Kriteria dari uji t, jika nilai signifikansi uji t > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Serentak (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variabel dependen. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%, jika nilai signifikan f 0,05 maka H_0 diterima H_1 ditolak artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

D. Koefisien Korelasi dan Determinasi

1. Uji Koefisien Korelasi

Adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Nilai r yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut, sementara nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisien korelasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang searah. Artinya, ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Selanjutnya, jika koefisien korelasi negatif, artinya kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan, yakni jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y justru rendah dan turun.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) merupakan parameter yang dipakai untuk mencerminkan

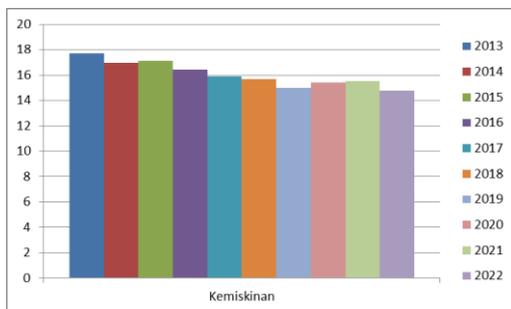
variasi yang dijelaskan pada model regresi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Nilai dari R^2 dilihat dari: (1) Jika nilai R^2 kecil dari 0, maka kemampuan variasi variabel dependen terbatas; (2) Jika nilai R^2 mendekati 1, maka kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variasi dependen sangat luas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan pada masyarakat individu untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan kehidupan dasar minimal, kebutuhan dasar ini dikelompokkan menjadi kebutuhan dasar makanan, maupun kebutuhan dasar bukan makanan yang tidak mampu dipenuhi oleh individu sehingga individu tidak dapat hidup dengan layak. Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2013-2022 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Persen)

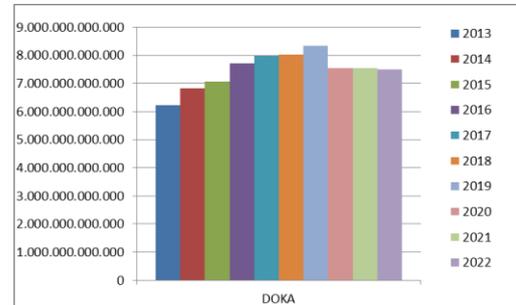
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022), data diolah

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2013-2022 mengalami fluktuatif, dapat dilihat dari gambar 1. Berdasarkan gambar tersebut angka kemiskinan di Provinsi Aceh tertinggi pada tahun 2013 yaitu 17,72% sedangkan angka kemiskinan terendah di Provinsi Aceh pada tahun 2022 yaitu 14,75%.

2. Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)

Dana Otonomi Khusus (DOK) adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Otonomi berarti hak yang diberikan kepada

penduduk suatu wilayah etnis tertentu yang tidak memiliki kedaulatan (politik) sendiri untuk menjalankan yurisdiksi eksekutif. Perkembangan DOKA di Provinsi Aceh tahun 2013-2022 dapat dilihat pada gambar 2.



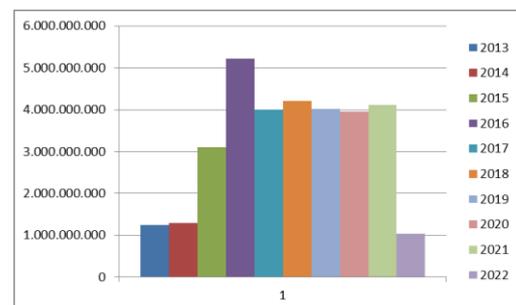
Gambar 2. Perkembangan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2013-2022

Sumber: Kemenkeu (2022), Data diolah

Berdasarkan gambar di atas perkembangan DOKA di Provinsi Aceh hampir setiap tahunnya meningkat, namun terjadi penurunan pada beberapa tahun yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp7.555 Triliun, tahun 2021 sebesar Rp7.555 Triliun dan tahun 2022 sebesar Rp7.500 Triliun, disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penghematan anggaran.

3. Dana Alokasi Khusus Aceh

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Aceh tahun 2013-2022 dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Aceh Tahun 2013-2022

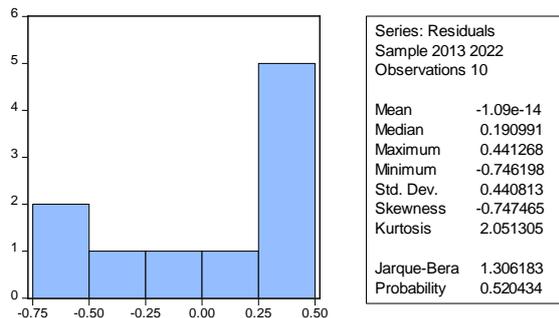
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022), Data diolah

B. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar memperoleh model analisis yang tepat, model analisis regresi linear berganda pada penelitian ini mensyaratkan asumsi terhadap data yang meliputi: uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.

1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian Uji normalitas bermaksud untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dari suatu model regresi terdistribusi normal, dapat dilihat jika probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0,05 sehingga data terdistribusi normal, tetapi jika probabilitasnya lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas yang diperoleh dari program Eviews 10 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 4, dapat diketahui bahwa hasil dari uji normalitas menunjukkan nilai $prob\ JB > 0,05$ yaitu sebesar 0,520434, maka bisa disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dan sebaliknya jika nilai $VIF >$

dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
LOG(DOKA)	1,921716
LOG(DAK)	1,921716

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa *centered VIF* untuk variabel DOKA 1,921716 dan variabel DAK 1,921716. Dikarenakan nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel tersebut.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Uji data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linear berganda harus diasumsikan deret waktu dan bebas dari autokorelasi. Untuk menentukan apakah sebuah model regresi bebas dari autokorelasi, dapat menggunakan metode *Breusch-Godfrey* atau uji LM (*Lagrange Multiplier*). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Indikator	Value
Prob. F(2,5)	0,1270
Prob. Chi-square(2)	0,0602

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4, nilai $prob. Obs * R-squared$ sebesar 0,0602 ($> 0,05$) maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak sebatas hubungan yang linear tetapi pada pola yang berbeda juga dimungkinkan. Dalam syarat uji regresi linear tidak boleh terkena heteroskedastisitas, uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini membandingkan nilai probabilitasnya $Obs * Rsquared$ apakah lebih besar dari nilai alpha 5%. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Indikator	Value
Prob. F(5,4)	0,7472
Prob. Chi-square(5)	0,5496
Prob. Chi-square(5)	0,9601

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5, diketahui nilai *prob. Obs*R-squared* sebesar 0,5496 (> 0,05) maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heteroskedastisitas.

5. Hasil Pengolahan Data Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder dengan metode regresi linear berganda dan program Eviews 10. Menurut Sugiyono (2016), analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil uji regresi linear berganda:

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Prob.
C	126,6796	0,0006
X1	-13,18965	0,0016
X2	0,878896	0,0544
R-squared		0,794293
Adjusted R-squared		0,735520
F-statistic		13,51450
F(prob)		0,003948
Durbin Watson stat		0,684757

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6, dapat diinterpretasikan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KEM = 126,6796 - 13.18965 DOKA + 0,878898 DAK + e$$

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 126.6796 menunjukkan apabila variabel dana otonomi khusus Aceh dan dana alokasi khusus bernilai konstan maka variabel dependen yaitu kemiskinan mempunyai nilai 126,6796%.
2. Nilai koefisien regresi variabel DOKA bernilai negatif (-) sebesar - 13,18965, hal ini menunjukkan negatif dan signifikan. Apabila dana otonomi khusus Aceh meningkat 1 Triliun maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar -13,18965%.
3. Nilai koefisien regresi variabel DAK bernilai positif (+) sebesar 0,878898, hal ini menunjukkan hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. Apabila dana

alokasi khusus meningkat 1 Triliun maka kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 0,878898%.

C. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis data baik melalui percobaan langsung maupun observasi atau secara tidak langsung. Maka untuk membuktikan ada tidak adanya hipotesis yang berpengaruh secara signifikan pada penelitian ini perlu dilakukan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

1. Hasil Pengujian Parsial (uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% (0,05). Kriteria dari uji t, jika nilai signifikansi uji t > 0,05 maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun analisis hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pengujian Secara Parsial (uji t)

Variabel Bebas	t-statistik	t-tabel	Prob.	Ket.
Dana Otonomi Khusus Aceh	-4,9586	1,8945	0,001	Negatif dan signifikan
Dana Alokasi Khusus	2,30717	1,89458	0,054	Positif dan tidak signifikan

Sumber: Data diolah, 2023

- Variabel DOKA memiliki nilai *t-statistic* sebesar -4,9586 dengan nilai *prob.* (signifikansi) sebesar 0,001 (< 0,05) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel DOKA berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan.
- Variabel DAK memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,30717 dengan nilai *prob.* (signifikansi) sebesar 0,054 (>0,05) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel

DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan.

2. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variabel dependen. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya. Ketentuan dari uji F, jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima H_1 artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat. Adapun analisis hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)

F-statistik	F-tabel	Probabilitas	Ket.
13,51450	4,74	0,003948	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2023

Diketahui nilai *F-statistic* sebesar 13,51450 dengan nilai *prob.* (*F-statistic*) sebesar 0,003948 ($< 0,05$) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel dana otonomi khusus Aceh dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap variabel kemiskinan.

D. Koefisien Determinasi dan Korelasi

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi variabel terikat. Koefisien korelasi merupakan pengukuran statistik antara dua variabel dengan mengukur hubungan variabel jika bernilai positif maka hubungan variabel searah jika bernilai negatif maka hubungan kedua variabel tidak searah.

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,735520 maka berkesimpulan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini korelasi kuat yaitu 73,55%. Nilai koefisien korelasi pada penelitian ini diperoleh dari $R = 0,857624$, jadi hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat

adalah hubungan erat secara positif karena nilai korelasi sebesar 0,857624 mendekati positif 1.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi regresi linear berganda yang telah dilakukan sebagai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Otonomi Khusus Aceh terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 6, dapat diketahui bahwa dana otonomi khusus Aceh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dengan nilai $-13,18965$ dengan nilai *prob.* 0,001, maka bisa diartikan bahwa jika variabel dana otonomi khusus Aceh meningkat maka variabel kemiskinan di Provinsi Aceh menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Munanda, 2019) yang meneliti pengaruh dana otonomi khusus Aceh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2012-2017, dan menunjukkan hasil penelitian dana otonomi khusus Aceh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dinyatakan bahwa dana otonomi khusus merupakan salah satu sumber pendapatan Aceh, yang dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur, pembedayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan untuk pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan. Penggunaan dana otonomi khusus oleh pemerintah Aceh tidak hanya diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, tetapi juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 6, dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh dari nilai 0,878898 dengan nilai signifikan sebesar $0,054 > \alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rasu dkk, 2019) yang meneliti dana alokasi khusus terhadap

kemiskinan di Kota Manado dan hasil penelitian tersebut dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Manado. Dana alokasi khusus Provinsi Aceh digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dana alokasi khusus dialokasikan untuk DAK fisik dan DAK non fisik. Adapun DAK fisik yaitu air minum, irigasi, jalan, perikanan, industri kecil dan menengah (IKM), lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata dan pendidikan. DAK nonfisik yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah seperti dana BOSP, dana tunjangan guru ASN daerah, dana BOK, dan dana alokasi khusus nonfisik jenis lainnya. Dana tersebut tersebar untuk 23 pemerintah daerah yang ada di Provinsi Aceh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan pembahasan tentang pengaruh dana otonomi khusus Aceh dan dana alokasi khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2013-2022, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut: (1) Hasil pengujian secara parsial variabel dana otonomi khusus Aceh berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Nilai statistik sebesar -4,9586 dengan nilai *prob.* (signifikansi) sebesar 0,001 (<0,05), artinya apabila dana otonomi khusus Aceh meningkat, kemiskinan di Provinsi Aceh akan menurun. (2) Hasil pengujian secara parsial variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Nilai statistik sebesar 2,30717 dengan nilai *prob.* (signifikansi) sebesar 0,054 (>0,05), artinya apabila dana alokasi khusus meningkat maka kemiskinan di Provinsi Aceh juga meningkat (3) Hasil pengujian secara bersama-sama variabel dana otonomi khusus Aceh dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan kemiskinan di Provinsi Aceh. Nilai *F-statistic* sebesar 13,51450 dengan nilai *prob.* (*F-statistic*) sebesar 0,0039 (<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana otonomi khusus Aceh dan dana alokasi khusus

berpengaruh secara serentak terhadap variabel kemiskinan.

REFERENSI

- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1 (2), 196-210.
- Anwar, M. L., Palar, S. W., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 (2), 218-232.
- Arifin. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 1 (2), 1-8. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.9>
- Bado, B., Alam, S., & Cahyani, A. (2018). The Effect of Government Admission on Poverty in The City of Makassar: 2000-2017. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 75 (1), 219-222.
- Basyir, Hamzah, A., & Syahnur, S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3 (1), 57-70.
- Dadek, T. A., Hasriati., Pahlevi, R., Handra, H., Suratman, E., Sidik, M., Indra., Chalil, T. M., & Nurkholis. (2022). Otonomi Khusus Aceh dan Kemiskinan (Sebab dan Upaya). *BAPPEDA Aceh*. <https://bappeda.acehprov.go.id/download/201079-buku-otonomi-khususaceh>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Diakses pada tanggal 16 Desember 2020, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/pukul> 22.30 WIB.
- Fahlevi, M. R. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Zakat terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai Variabel Intervening. (*Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*).

- <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/28902>
- Gumelar, Agum. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). (*Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/>
- Ikhsan, Hajad, V., Marefanda, N., Saputra, A., & Herizal. (2022). The Special Autonomy Funds are not for Poverty Alleviation: A lesson from Aceh's Way. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 5 (2), 161-175.
- Ikhsan, Saily. (2011). *Dana Alokasi Khusus dalam Pembiayaan Pembangunan*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, dari <http://www.blogger.sailyikhsan.com> pukul 20.50 WIB
- Kadafi, M., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3 (2), 23. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>
- Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. (*Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta*). <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/13795>
- Maulana, Ichsan., & Masbar, Raja. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3 (1), 82-83.
- Mediyanti, S. (2019). Analisis Dampak Realisasi Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7 (1), 56-60. <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>
- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5 (3), 231. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>
- Munanda, R. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Perumahan, dan Fasilitas Umum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2012-2017. (*Tesis Sarjana, Universitas Gadjah Mada*). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/181867>
- Nailufar, F., & Sufitrayati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 10 (1), 83-103.
- Panji, I. P. B., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5 (3), 317.
- Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. M. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2 (4), 12-25.
- Sakinah. (2022). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. (*Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Arraniry*). <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/23325/>
- Solihin, D. (2014). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. *Yayasan Empat Sembilan Indonesia*. <http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/70>
- Syahidin, S., & Jalil, M. A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of*

- Economics Review*, 2 (1), 1-15.
<https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i1.162>
- Wahid, R. M., & Sarfiah, S. N. (2021). Analysis of Factors Affecting the Poverty Gap Index in Aceh Province 2017-2019. *Research Horizon*, 1 (6), 217- 228.
- Yani, Ahmad. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.